



PENILAIAN RISIKO **BAPPENDA** TAHUN 2017



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: dispenda@ntbprov.go.id, www.dispenda.ntbprov.go.id



PENGANTAR

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan pemerintah daerah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Hal tersebut mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unsurnya, salah satunya adalah terbangunnya Risk Register di tingkat entitas kegiatan. Untuk menindak lanjutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengimplementasikannya melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar subunsur Penilaian Risiko sehingga wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Bappenda Provinsi NTB nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

Penilaian Risiko ini tentu masih jauh dari sempurna jika dikaitkan dengan beragamnya karakteristik dan jenis kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ir. H. ISWANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Metodologi	3
 BAB II PROFIL BAPPENDA PROVINSI NTB	4
A. Struktur Organisasi	4
B. Visi, Misi, Nilai, Tujuan dan Sasaran	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. Kegiatan Utama	7
 BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO	9
A. Kriteria Penilaian Risiko.....	9
B. Identifikasi Risiko	10
C. Analisa Risiko.....	11
 BAB IV SIMPULAN.....	14
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan Penilaian Risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja instansi pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar subunsur Penilaian Risiko sehingga wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

SPIP terdiri LIMA unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian risiko merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dalam metodologi maupun dalam implementasinya.

Metode analisis risiko belum banyak dikembangkan di dalam SPIP. Demikian pula lemah dalam implementasi yang mencakup komponen identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pengelolaan maupun pemantauan risikonya.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan identifikasi risiko didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Gubernur NTB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penilaian Risiko

Tujuan Penilaian risiko pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan;
- b. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan

2. Manfaat Penilaian Risiko

Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengendalian pada Bappenda Provinsi NTB.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penilaian Risiko meliputi seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTB yang berada di lingkungan Bappenda Provinsi NTB yang terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
3. Bidang Pajak Daerah;
4. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya;
5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan;
6. UPTB PPD terdiri dari:
 - Kepala UPTB Mataram
 - Kepala UPTB Gerung
 - Kepala UPTB Praya
 - Kepala UPTB Selong
 - Kepala UPTB Tanjung
 - Kepala UPTB Taliwang
 - Kepala UPTB Sumbawa-Besar
 - Kepala UPTB Dompu
 - Kepala UPTB Raba-Bima
 - Kepala UPTB Panda

E. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Bappenda Provinsi NTB baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah *brainstorming* dan *Focus Group Discussion* yang melibatkan seluruh bagian/bidang dan UPTD di lingkungan Bappenda Provinsi NTB.

BAB II

PROFIL BAPPENDA PROVINSI NTB

A. STRUKTUR ORGANISASI

OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara teknis dan fungsional, selanjutnya disebut BAPPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan. Lebih lanjut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, Struktur Organisasi Bappenda terdiri Kepala Badan (Eselon II), dibantu oleh lima Eselon IIIa pada kantor Induk yakni Sekretaris; Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Bidang Pajak Daerah; Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan Bidang Pengendalian dan Pembinaan; serta sepuluh Eselon IIIb pada UPTB, dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB



B. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappenda yang bertugas sebagai organisasi yang menangani Pengelolaan Pendapatan Daerah dan setelah diproses melalui penetapan atau pemilihan nilai-nilai pribadi sebagaimana terlampir (pada tabel langkah II). Pada akhirnya dipilih salah satunya sebagai nilai-nilai organisasi, maka disepakati VISI BAPPENDA dengan rumusan: “**MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH YANG KUAT DAN AMANAH**”

Adapun misi Bappenda NTB adalah :

- 1) Merumuskan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2) Melaksanakan Pelayanan Samsat Pajak Kendaraan Bermotor;
- 3) Melaksanakan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- 4) Melaksanakan Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- 5) Melaksanakan Peningkat-an Kinerja dan Profesionalitas SDM Pendapatan Daerah

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari **IHSAN**, yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut diatas dengan rumusan sebagai berikut:

Integritas [Bekerja dengan penuh integritas, selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi; **Harmonis** [Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati; **Sinergi** [Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar; **Amanah** [Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat; dan **Niat** [Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan];

Percepatan pembangunan diperlukan agar NTB bias berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan dinisbatkan untuk meningkatkan marwah atau kehormatan kolektif masyarakat NTB di pentas pergaulan nasional. Untuk itu itulah visi NTB Bersaing harus menjadi barometer seluruh perangkat daerah dan masyarakat, yang menginspirasi

bergemanya TGB Spirit sebagai persembahan terbaik untuk NTB, yakni: Kerja keras; Kesungguhan; Komitmen; Kebersamaan; dan Keberpihakan kepada rakyat.

Tujuan

- 1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, dan Kualitas Analisis Laporan;
- 2) Meningkatkan Aksesibilitas Data Informasi dan Inovasi Pendapatan Daerah;
- 3) Meningkatkan Kuantitas dan Kontinuitas PKB, BBNKB & Pajak Daerah Lainnya;
- 4) Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah;
- 5) Meningkatkan Kuantitas Dan Kontinuitas Retribusi, Dana Perimbangan, Dan Pajak Lainnya;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Pembinaan Dan Efektifitas Pengurusan Hukum Serta Sengketa Pajak;
- 7) Meningkatkan Kualitas dan Tertib Administrasi Keuangan, Umum & Kepegawaian, dan Perlengkapan.

Sasaran

- 1) Dokumen Perencanaan dan Rencana Kinerja Yang Berkualitas;
- 2) Laporan Analisis Pengelolaan Pendapatan Berkualitas;
- 3) Sarana dan Prasarana Berbasis Informasi Teknologi;
- 4) Tervalidasinya Objek Data Secara Periodik;
- 5) Tersedianya Sarpras Penunjang yang Memadai;
- 6) Terlaksananya Operasi Kendaraan Bermotor Secara Rutin;
- 7) Tersedianya Tenaga Lapangan Yg Handal;
- 8) Tervalidasinya Potensi Pajak;
- 9) Terlaksananya Berbagai Ketentuan & Kebijakan Pajak Daerah;
- 10) Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah;
- 11) Berkurang-nya Angka TMDU secara Signifikan;
- 12) Terbaharuinya Data Base Potensi Retribusi;
- 13) Tergalinya Potensi Retribusi Baru;
- 14) Terbinanya Teknis Pemungutan Retribusi;
- 15) Mantapnya Kerjasama dalam Ikhtiar Transfer Dana setiap periode;
- 16) Meningkatnya dukungan Dana Transfer ke Daerah;
- 17) Pemutakhiran Data Base Pendapatan Lainnya;
- 18) Mengupayakan Review Berbagai Ketentuan Dan Kebijakan Menyesuaikan Perubahan Organisasi;

- 19) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak;
- 20) Menguatkan Pola Pembinaan Ke Semua UPTB Untuk Peningkatan, Perluasan Dan Kemudahan Pelayanan Samsat;
- 21) Memastikan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
- 22) Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel;
- 23) Aparat yang Responsif;
- 24) Sarana dan Prasarana Kerja yang prima;
- 25) Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah;
- 26) Laporan Aset Berkualitas

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bappenda Provinsi NTB merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan, peningkatan pendapatan daerah menjadi tugas dari Bappenda Provinsi NTB, dengan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. AKTIFITAS UTAMA

Bappenda Provinsi NTB telah menetapkan Program (yang disesuaikan dengan Program Pembangunan Daerah yang merupakan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya) yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7) Program Reformasi Birokrasi; dan
- 8) Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Kegiatan utama Bappenda Provinsi NTB terdiri dari 13 kegiatan utama yaitu:

1. Administrasi Umum dan Kepegawaian
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Perlengkapan
4. Menghimpun dan Menyusun Laporan Pajak Daerah
5. Menyiapkan Sistem Manajemen Mutu
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah
7. Konsultasi dan koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan
8. Penyusunan Renja, RKA dan DPA
9. Penyusunan Laporan Berkala
10. Pengelolaan Teknologi dan Informasi
11. Pelaksanaan Rakor Penetapan Target Pendapatan
12. Perubahan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13. Pelayanan Kesamsatan di UPTB UPPD

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB menggunakan skala 5 (lima), dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Dampak
Bappenda Provinsi NTB

No	Skala	Keterangan
1	Sangat Kecil	Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas tujuan organisasi dan atau kegiatan
2	Kecil	Sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan
3	Cukup Besar	Berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi dan atau kegiatan
4	Besar	Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan organisasi dan atau kegiatan
5	Sangat Besar	Sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan atau kegiatan

2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Bappenda Provinsi NTB menggunakan skala 5 (lima) dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Kemungkinan (Probabilitas)

Bappenda Provinsi NTB

No	Skala	Keterangan
1	Sangat Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali
2	Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
3	Kadang-Kadang	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
4	Sering	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
5	Sangat Sering	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali

3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Bappenda Provinsi NTB adalah 5 x 5 dengan deskripsi sebagai berikut:

Skala Risiko

Bappenda Provinsi NTB

PROBABILITAS	5	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	4	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	3	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
	2	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
	1	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

B. IDENTIFIKASI RISIKO

Bappenda Provinsi NTB pada tahun 2017 memiliki 68 risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Risiko Beridentifikasi
Bappenda Provinsi NTB

No	Bidang	2017		
		Risiko	Sebab	
1	Sekretariat	15	121	
2	Bidang Pajak Daerah	10	91	
3	Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya	15	181	
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	13	112	
5	Bidang Pengendalian dan Pembinaan	8	65	
6	UPTB UPPD	7	78	
Jumlah		68	648	

C. ANALISA RISIKO

Analisa risiko dilakukan dengan penyebaran **fgd/expert judgment/kuesioner** kepada responden secara acak kepada pegawai Bappenda Provinsi NTB.

Hasil analisa risiko Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Hasil Analisa risiko pada Sekretariat pada Bappenda Provinsi NTB digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Kegiatan Kesekretariatan

No	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		0
2	Tinggi		7
3	Sedang		5
4	Rendah		3

2. Bidang Pajak Daerah

Hasil Analisa risiko pada Bidang Pajak Daerah pada Bappenda Provinsi NTB digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang Pajak Daerah

No	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		0
2	Tinggi		4
3	Sedang		6
4	Rendah		0

3. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

Hasil Analisa risiko pada Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya pada Bappenda Provinsi NTB digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

No	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		2
2	Tinggi		6
3	Sedang		7
4	Rendah		0

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Hasil Analisa risiko pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Bappenda Provinsi NTB digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang Perencanaan dan Pengembangan

No	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		0
2	Tinggi		4
3	Sedang		9
4	Rendah		0

5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

Hasil Analisa risiko pada Bidang Pengendalian dan Pembinaan pada Bappenda Provinsi NTB digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko Bidang Pengendalian dan Pembinaan

No	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		0
2	Tinggi		0
3	Sedang		8
4	Rendah		0

6. UPTB UPPD

Hasil Analisa risiko pada Unit Pelayanan Teknis Badan UPPD Kota Mataram pada Bappenda Provinsi NTB digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Hasil Analisa Risiko UPTB UPPD

No	Uraian	Warna	Jumlah
1	Sangat Tinggi		2
2	Tinggi		2
3	Sedang		1
4	Rendah		2

BAB IV

SIMPULAN

Dari hasil penilaian risiko pada Bappenda Provinsi NTB dapat diambil kesimpulan:

1. Risiko dengan kategori “**sangat tinggi**” berjumlah 4 risiko dengan rincian Bidang Retribusi 2 Risiko, dan UPTB UPPD 2 Risiko
2. Risiko dengan kategori “**tinggi**” berjumlah 23 risiko dengan rincian Sekretariat 7 risiko, Bidang Pajak 4 Risiko, Bidang Retribusi 6 Risiko, Bidang Renbang 4 Risiko, Bidang Dalbin 0 Risiko, UPTB UPPD 2 Risiko
3. Risiko dengan kategori “**Sedang**” berjumlah 36 risiko dengan rincian Sekretariat 5 risiko, Bidang Pajak 6 Risiko, Bidang Retribusi 7 Risiko, Bidang Renbang 9 Risiko, Bidang Dalbin 8 Risiko, UPTB UPPD 1 Risiko
4. Risiko dengan kategori “**Rendah**” berjumlah 5 risiko dengan rincian Sekretariat 3 risiko, dan UPTB UPPD 2 Risiko

LAMPIRAN

NAMA ENTITAS : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Penyusunan	Tersusunnya Daftar Risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada, dan sisa risikonya.
Nama Kegiatan	Administrasi dan Umum [SEKRETARIAT]
Tujuan Kegiatan	Tertib Admnistrasi Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan

DAFTAR RISIKO SEKRETARIAT

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
1.1	Admnistrasi Keuangan						
1.1.1	Pengajuan SPP-GU/LS belanja Barang dan Jasa terlambat	Sekretaris	Internal	C	Bukti pertanggungjawa-ban terlambat diterima Bukti pertanggungjawaban kurang atau salah Pelaksanaan belanja tidak berdasarkan anggaran kas	Penagihan Verifikasi dan Perbaikan SPJ DPA, Daftar rincian obyek belanja	Pengajuan SPP-GU/LS belanja Barang dan Jasa terlambat
1.1.2	Realisasi/ serapan anggaran tidak mencapai target	Sekretaris	Internal	C	Kegiatan belum dilaksanakan SDM penyusun SPJ kurang memahami Sisdur.	Jadwal kegiatan, PKPT, DPA Pelatihan terhadap Sisdur	Realisasi/ serapan anggaran tidak mencapai target
1.1.3	Kehilangan/ketekoran kas	Sekretaris	Internal	C	Anggaran tidak tersedia di DPA Pencurian Adanya uang palsu dan uang kurang dari bank	Usulan perubahan anggaran Pemasangan Trali, Pengamanan Brankas uang dihitung di depan kasir, pen-deteksi uang palsu	Kehilangan/ ketekoran kas

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
1.1.4	Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran (SPJ)	Sekretaris	Internal	C	SDM penyusun SPJ kurang memahami Sisdur dan kurang memahami DPA	DPA, verifikasi SPJ	Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran (SPJ)
1.1.5	Laporan Keuangan terlambat	Sekretaris	Internal	C	Keterlambatan rekonsili-asi data dengan entitas pelaporan SKPKD	Jadwal rekonsiliasi	Laporan Keuangan terlambat
1.1.6	Laporan Keuangan tahunan tidak sesuai SAP	Sekretaris	Internal	C	Kurangnya pemahaman SDM penyusun atas SAP	Pelatihan akuntansi, review laporan berjenjang	Laporan Keuangan tidak sesuai SAP
1.2	Administrasi Kepegawaian						
1.2.1	Keterlambatan kenaikan pangkat	Sekretaris	Internal	C	Monitoring KP tidak akurat	Verifikasi data KP oleh Petugas sebulan sebelumnya	Keterlambatan kenaikan pangkat
1.2.2	Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi	Sekretaris	Internal	C	Kekurangan anggaran Kesalahan perencanaan	DPA, kalender diklat	Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi
1.2.3	Penerbitan SK KGB terlambat	Sekretaris	Internal	C	Monitoring KGB tidak akurat		Penerbitan SK KGB terlambat
1.2.4	Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat	Sekretaris	Internal	C	Monitoring KP tidak akurat		Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat
1.2.5	Penyusunan laporan Rekapitulasi Absensi tidak tepat waktu	Sekretaris	Internal	C	Terlambat penyampaian laporan absensi dari UPTB UPPD	Melakukan Komunikasi kepada UPTB	Penyusunan laporan Rekapitulasi Absensi tidak tepat waktu
1.2.6	Data Rekapitulasi Absensi tidak akurat	Sekretaris	Internal	c	Input Data kurang cermat	Review berjenjang	Data Rekapitulasi Absensi tidak akurat
1.3	Perlengkapan						
1.3.1	Kehilangan barang inventaris	Sekretaris	Internal	C	Pencurian	Penjaga kantor, pemasangan terali, brankas	Kehilangan barang inventaris

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
					Tidak ada gudang penyimpanan barang inventaris	Sememntara disimpan diruang kerja	
					Kecurangan/ kelalaian	Bukti peminjaman/ bukti pemegang barang	
1.3.2	Kerusakan barang	Sekretaris	Internal	C	Salah Cara Penggunaan	Adakan Pelatihan dan Pembuatan SOP	Kerusakan barang
					Anggaran pemeliharaan yang terbatas	SK pemegang barang	
1.3.3	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan kebutuhan	Sekretaris	Internal	C	Kesalahan perencanaan	Perubahan/Revisi DPA	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan kebutuhan

Nama Kegiatan

Menghimpun dan Menyusun Laporan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan

Menyediakan informasi yang valid terkait realisasi Pajak Daerah

DAFTAR RISIKO BIDANG PAJAK DAERAH

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.1	Keterlambatan Laporan PKB dan BBNKB dari UPTB UPPD	Kabid Pajak Daerah	Internal	U	SDM yang terbatas baik kualitas dan kuantitas	Memberikan batas waktu pelaporan	Keterlambatan Laporan dari UPT
2.1.2	Keterlambatan Laporan Pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan	Kabid Pajak Daerah	External	U	Sistem penyampaian laporan manual	Memberikan batas waktu pelaporan	Keterlambatan Laporan Pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
2.1.3	Data dari UPTB UPPD kurang valid	Kabid Pajak Daerah	Internal	C	1. Perbedaan persepsi terhadap cara pengisian form laporan 2. Form laporan yang banyak	1. Rekonsiliasi data 2. Penyederhanaan Form laporan	Data dari UPT kurang valid
2.1.4	Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersifat sepihak	Kabid Pajak Daerah	External	U	Sumber laporan hanya dari Penyedia Bahan Bakar (WAPU)	Berkoordinasi dengan stakeholder/pihak terkait	Data yang kurang valid
2.1.5	Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Daerah	Kabid Pajak Daerah	Internal	C/U	1. Sumber data yang belum divalidasi 2. Adanya tugas tambahan	1. Rekonsiliasi dengan instansi terkait 2. Mengusulkan tambahan personil 3. Mengefektifkan waktu kerja	Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Daerah

Nama Kegiatan **Menyiapkan Sistem Manajemen Mutu**

Tujuan Kegiatan **Seluruh UPTB UPPD Se-NTB menerapkan Sistem Manajemen Mutu**

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2.1	Keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran PKB, PBBKB dan PAP	Kabid Pajak Daerah	Internal	C	Penerapan SOP belum maksimal	1. In House Training Petugas Pelayanan 2. Menyediakan CSO	Keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran PKB, PBBKB dan PAP
2.2.2	Tingginya angka Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)	Kabid Pajak Daerah	Internal	C	Kesadaran WP yang rendah	1. Penyampaian surat teguran	Tingginya angka Tidak Melakukan

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
						2. Memperluas dan menambah jam layanan 3. Sosialisai melalui Media Cetak dan elektronik	Daftar Ulang (TMDU)

Nama Kegiatan **Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah**

Tujuan Kegiatan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3.1	Tidak tercapainya target pajak daerah	Kabid Pajak Daerah	Internal	C	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	1. Sosialisasi ke masyarakat tentang pajak daerah 2. Koordinasi dengan instansi terkait 3. Membuat regulasi pembebasan BBNKB terhadap kendaraan plat luar daerah 4. Pendataan kendaraan luar daerah	Tidak tercapainya target pajak daerah
2.3.2	Tingginya angka tidak melakukan daftar ulang (TMDU)	Kabid Pajak Daerah	External	U	Belum diterapkannya prosedur pajak secara utuh	Menyediakan data TMDU yang valid	Tingginya angka tidak melakukan

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
							daftar ulang (TMDU)
2.3.3	Data obyek pajak Air Permukaan kurang valid	Kabid Pajak Daerah	External	U	Terbatasnya informasi terkait dengan obyek pajak air permukaan	1. Koordinasi dengan instansi terkait 2. Melakukan pendataan obyek Pajak Air Permukaan 3. Sosialisasi Pajak Air Permukaan	Data obyek pajak Air Permukaan kurang valid

Nama Kegiatan **Konsultasi dan koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan**

Tujuan Kegiatan **Memastikan transfer dana pusat sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku**

DAFTAR RISIKO BIDANG RETRIBUSI

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
3.1.1	Penundaan penyaluran dan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan DAK (SPJ)	Membuat surat teguran kpd OPD pengelola DAK atas keterlambatan penyampaian laporan	Penundaan penyaluran dan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3.1.2	Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	Menunggu diterbitkannya PMK	Koordinasi dgn Pemerintah Pusat (kemenkeu)	Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar
			Eksternal	U	Ketersediaan dana pada APBN	Koordinasi dgn Pemerintah Pusat (kemenkeu)	Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
3.1.3	Keterlambatan penyajian laporan dana perimbangan kepada pimpinan	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	Transfer Dana Pusat tidak terinci	Koordinasi dgn Pemerintah Pusat (kemenkeu) dan BPKAD (Bagian Kasda)	Keterlambatan penyajian laporan dana perimbangan kepada pimpinan

Nama Kegiatan Sinkroniasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL

Tujuan Kegiatan Menyediakan informasi yang valid terkait data potensi sebagai bahan penetapan rencana target Retribusi dan PLL

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
3.2.1	Data potensi obyek penerimaan tidak akurat	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Internal	C	Tidak terdapat data based data potensi	Pemutakhiran Data Potensi	-
3.2.2	Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	obyek retribusi jarang digunakan karena kalah saing dengan jasa serupa yang ditawarkan swasta	Inovasi pengelola obyek retribusi daerah	Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah
			Eksternal	U	beberapa obyek retribusi tergantung dari kondisi cuaca dan masa panen (misalnya dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dan peternakan)	Inovasi pengelola obyek retribusi daerah	Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah
			Eksternal	U	regulasi yang mengatur ttg kerjasama pemanfaatan aset sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini	penyampaian surat kepada BPKAD selaku pengelola retribusi tersebut untuk meninjau kembali regulasi/PK yg digunakan sebagai acuan	Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
3.2.3	Realisasi target penerimaan obyek pendapatan lainnya rendah	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	C	terdapat perusda yang tidak menyetorkan deviden ke kas daerah	penyampaian surat teguran kepada Perusda tersebut	Realisasi target penerimaan obyek pendapatan lainnya rendah
3.2.4	Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlalu besar atau terlalu sedikit	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Internal	C	Tidak terdapat data based data potensi retribusi dan PLL	Pemutakhiran Data Potensi	Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlalu besar atau terlalu sedikit
			Internal	C	Tarif obyek retribusi yang ditetapkan melebihi atau kurang dari nilai pasar	Revisi tarif obyek retribusi dengan penetapan Pergub	Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlalu besar atau terlalu sedikit

Nama Kegiatan **Verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL**

Tujuan Kegiatan **Menyediakan informasi yang valid terkait realisasi retribusi daerah dan pendapatan lainnya**

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyajian laporan						
3.3.1	Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	C	Terdapat lokasi SKPD Pengelola Retribusi & PLL di luar wilayah kota Mataram	Penyampaian surat edaran batas waktu penyampaian laporan, penyampaian laporan menggunakan group WA dan email	Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL
			Internal	C	Terdapat lokasi SKPD Pengelola PLL di luar wilayah kota Mataram	Penyampaian surat edaran batas waktu	Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
						penyampaian laporan, penyampaian laporan menggunakan group WA dan email	dan PLL
			Eksternal	C	Masih menggunakan laporan manual	Penyampaian laporan menggunakan group WA dan email	Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL
3.3.2	Data dari SKPD tidak sinkron/valid	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	C	Ketidakteitian bendahara penerima SKPD	Rekonsiliasi dengan SKPD terkait	-
	Monitoring						
3.3.3	Saat Monitoring ke SKPD, tidak bertemu langsung dengan pimpinan SKPD dan atau bendahara penerima	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	Pimpinan SKPD ataupun Bendahara tidak ada di tempat (TD/Izin/Rapat)	Mengabarkan Via Tlp/Sms bahwa akan dilakukan pembinaan pada SKPD yang bersangkutan	Saat Monitoring ke SKPD, tidak bertemu langsung dengan pimpinan SKPD dan atau bendahara penerima
3.3.4	Data yang diperlukan belum siap	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	Ketidaktertiban dalam pengadministrasian data	data yang diperlukan dikirim via email atau post	Data yang diperlukan belum siap
			Eksternal	U	Operator/Bendahara tidak ada ditempat	data yang diperlukan dikirim via email atau post	Data yang diperlukan belum siap
			Eksternal	U	Komputer/printer rusak	data yang diperlukan dikirim via email atau post	Data yang diperlukan belum siap

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
3.3.5	Gangguan Kesehatan (Mabuk/pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	U	Lokasi yang jauh	Waktu pelaksanaan selama 3 hari sehingga ada waktu untuk beristirahat	Gangguan Kesehatan (Mabuk/pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)
			Eksternal	U	Jalan yang rusak	Menggunakan kendaraan dinas	Gangguan Kesehatan (Mabuk/pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)

Nama Kegiatan		Intensifikasi obyek retribusi dan pendapatan lainnya					
Tujuan Kegiatan		Peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola retribusi dan Pendapatan lainnya					
KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
	Bimtek Bendahara Penerimaan/Rakor Evaluasi Penerimaan						
3.4.1	SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	C	SKPD tidak atau terlambat menerima undangan Bimtek/Rakor	Penyampaian undangan secara langsung dilengkapi tanda terima penerima dan juga melalui email, WA Group,	SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
						Telepon dan SMS minimal h-3 dari waktu pelaksanaan Bimtek	
			Eksternal	C	Keterbatasan dana pada SKPD di luar Kota Mataram	Menyampaikan hasil Bimtek/Rakor saat Rekonsiliasi	SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor
3.4.2	Perwakilan dari SKPD bukan bendahara penerimaan atau pembantu bendahara penerimaan Pejabat terkait yang menangani penerimaan daerah	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	C	Bendahara/ pembantu Bendahara atau Pejabat terkait sedang berhalangan (sakit/ijin/cuti)	Memastikan agar perwakilan tersebut menyampaikan hasil bimtek kepada Bendahara penerimaan atau pejabat terkait	Perwakilan dari SKPD bukan bendahara penerimaan atau pembantu bendahara penerimaan Pejabat terkait yang menangani penerimaan daerah
3.4.3	Keterlambatan peserta/narasumber Bimtek/ Rakor	Kabid Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL	Eksternal	C	Terdapat lokasi SKPD Pengelola Retribusi & PLL di luar wilayah kota Mataram	Penyampaian undangan minimal h-3 dari pelaksanaan Bimtek	Keterlambatan peserta/narasumber Bimtek/ Rakor
			Eksternal	C	SKPD terlambat menerima undangan Bimtek/Rakor	Penyampaian undangan melalui email, WA Group, Telepon dan SMS minimal h-3 dari waktu pelaksanaan Bimtek	Keterlambatan peserta/narasumber Bimtek/ Rakor

Nama Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Penyusunan Renja, RKA dan DPA
Tersusunnya Renja, RKA dan DPA yang berkualitas (memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan)

DAFTAR RISIKO BIDANG PEENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1	Penyusunan Renja, RKA dan DPA						
4.1.1	Penyusunan Renja, RKA dan DPA tidak tepat waktu	Kabid Renbang	Eksternal	U	Keterlambatan penetapan KUA/PPAS	-	Penetapan RKA dan DPA tidak tepat waktu
			Eksternal	U	Pembahasan yang berlarut-larut di tingkat TAPD	-	
			Internal	C	Tidak adanya KAK	Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA DPA, Standar Satuan Harga	
						SK Tim Penyusunan RKA dan DPA	
			Internal	C	kurangnya waktu untuk mengerjakan, banyak menghadiri undangan/kegiatan lain yang ditugaskan	Mengerjakan diluar jam kerja (ekstra) tanpa diperhitungkan kelebihan waktu tsb	
			Internal	C	Pihak-pihak yang berkepentingan terlambat memberikan data	memberikan batas waktu penyerahan data dan menghungi untuk mengingatkan	

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
4.1.2	Kegiatan di DPA belum/tidak bisa direalisasikan	Kabid Renbang	Internal	C	Alokasi anggaran kas yang kurang tepat	Melaksanakan Revisi Anggaran Kas	Kegiatan di DPA tidak bisa direalisasikan
					Pelaksana anggaran kurang teliti	membuat buku kontrol kegiatan	
4.1.3	Kegiatan dalam DPA ada yang tidak sesuai kebutuhan	Kabid Renbang	eksternal	U	ada kegiatan dalam RKA yang tidak disetujui dalam pembahasan lebih lanjut	Mengupayakan persetujuan dengan Tim TAPD dengan alasan-alasan realistis berikut data dukung dan dokumen KAK/TOR yang valid.	Kegiatan dalam DPA ada yang tidak sesuai kebutuhan
			internal	C	pembuat RKA tidak paham akan kebutuhannya	Koordinasi dengan pembuat RKA	

Nama Kegiatan

Penyusunan Laporan Berkala

Tujuan Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Analisis dan Pelaporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB

4.2	Penyusunan Laporan Berkala						
4.2.1	Laporan Berkala terlambat	Kabid Renbang	Internal	C	Data pendukung dari bidang dan UPTB yang terlambat dan kurang lengkap	memberikan batas waktu penyerahan data dan menghubungi untuk mengingatkan	Laporan Terlambat
					kurangnya waktu untuk mengerjakan, banyak menghadiri undangan/ kegiatan lain yang ditugaskan	Koordinasi dengan bidang dan UPTB mengerjakan diluar jam kerja	

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
4.2.2	Laporan Berkala tersaji dengan data sementara	Kabid Renbang	Internal	C	Data Penerimaan pendapatan daerah yang berubah-ubah setiap waktu	Koordinasi dengan Bidang, UPTB dan BPKAD menyajikan data LKjIP dan laporan lainnya dengan mencantumkan tanggal LRA yang digunakan	Laporan tersaji dengan data sementara

Nama Kegiatan		Pengelolaan Teknologi dan Informasi					
Tujuan Kegiatan		Meningkatnya aksesibilitas data dan informasi pendapatan berbasis IT					
4.3	Pengelolaan Teknologi dan Informasi						
4.3.1	Pelayanan pajak daerah (secara online) terganggu	Kabid Renbang	internal	C	Gangguan jaringan	Menggunakan 2 sistem jaringan (kabel dan kartu) Melakukan kontrol server setiap saat sebelum digunakan	Pelayanan pajak daerah (secara online) terganggu
			internal	C	Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang IT	Melakukan pelatihan dan diklat serta merekrut pranata komputer yang memiliki kompetensi IT	
			eksternal	U	Penyedia jaringan melakukan maintenance	Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas jaringan baik hardware maupun software secara berkala	

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
			eksternal	U	Pemadaman listrik	Penyediaan genset dan Uninterrupted Power Supply (UPS) kapasitas Medium	
4.3.2	Sarana dan prasarana teknologi kurang memadai/mendukung	Kabid Renbang	internal	C	hardware dan software yang belum update	mengupdate dan mengikuti perkembangan IT	Sarana dan prasarana teknologi kurang memadai/mendukung
			internal	C	ada beberapa peralatan penunjang (baru) yang belum diakomodir di DPA	Merevisi anggaran DPA	

Nama Kegiatan		Pelaksanaan Rakor Penetapan Target					
Tujuan Kegiatan		Terwujudnya persamaan persepsi dalam penetapan target Pajak dan retribusi					
4.4	Pelaksanaan Rakor Penetapan Target						
4.4.1	Pelaksanaan Rakor terlambat	Kabid Renbang	eksternal	U	Usulan Penetapan target dari OPD terlambat	memberikan batas waktu penyerahan data dan menghubungi untuk mengingatkan	Pelaksanaan Rakor terlambat
			Internal	C	alokasi waktu yang sering berubah	Koordinasi dengan OPD Berkoordinasi dengan pimpinan dan pihak-pihak terkait	
4.4.2	Peserta yang diundang tidak lengkap	Kabid Renbang	Internal	C	Kurang teliti dalam memilih calon peserta	Memastikan kembali peserta yang akan diundang baik yang potensial maupun tidak	Peserta yang diundang tidak lengkap

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
4.4.3	Ada beberapa peserta tidak hadir	Kabid Renbang	Internal	C	Undangan tidak sampai kepada personal yang dituju	Membuat tanda terima undangan dan permintaan nomor kontak person	Ada beberapa peserta tidak hadir
			eksternal	U	Peserta enggan hadir	Peserta akan diberikan souvenir /cinderamata	
4.4.4	Pembahas berhalangan hadir	Kabid Renbang	Internal	C	Ada kegiatan lain yang ditugaskan	Diambil alih oleh pembahas lainnya	-
4.4.5	Pihak Hotel tidak maksimal dalam memberikan layanan	Kabid Renbang	eksternal	U	Akomodasi yang sudah tertera dalam perjanjian, tidak disediakan	Koordinasi dengan Pihak hotel, H-1 pelaksanaan kegiatan	-
					Keterlambatan dalam penyediaan Coffee Break dan Lunch	Mengingatkan pihak hotel, satu jam sebelum jadwal pelaksanaan	-
4.4.6	Adanya OPD yang belum sepakat mengenai penetapan besaran target pendapatan daerah	Kabid Renbang	eksternal	U	Perbedaan usulan target pendapatan daerah dari OPD dengan usulan dari Bappenda NTB	Koordinasi dan penyamaan persepsi antara OPD lain dengan Bappenda NTB Menandatangani berita acara kesepakatan penetapan target pendapatan daerah	-

Nama Kegiatan	Perubahan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tujuan Kegiatan	Memberikan Kepastian Hukum atas Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DAFTAR RESIKO BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

KIR*)	Pernyataan Resiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Resiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1.1	Pembahasan Peraturan Daerah Tertunda	Kepala Bidang	internal	C	Peserta Rapat tidak Lengkap	Pengaturan Ulang jadwal Rapat	Pembahasan Peraturan Daerah Tertunda
			internal	C	Data tidak Lengkap	Koordinasi dengan Bidang Terkait	
			internal	C	Fasilitas kurang memadai	Koordinasi dengan Bidang Terkait	
5.1.2	Pemetaan Potensi Retribusi Daerah kurang akurat	Kepala Bidang	Eksternal	U	SDM instansi terkait kurang memadai	-	Pemetaan Potensi Retribusi Daerah kurang akurat
			Eksternal	C	Data tidak Lengkap	Koordinasi dengan instansi terkait	
			Eksternal	U	Lokasi sulit terjangkau	-	
5.1.3	Penyusunan draft Peraturan Daerah terhambat	Kepala Bidang	internal	C	Tim Penyusun tidak lengkap	Pengaturan Ulang jadwal Penyusunan	Penyusunan draft Peraturan Daerah terhambat
			internal	C	Data tidak Lengkap	Koordinasi dengan Bidang Terkait	
			internal	C	Fasilitas kurang memadai	Koordinasi dengan Bidang Terkait	
5.1.4	Usulan draft Rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum terhambat	Kepala Badan	internal	C	Fasilitas kurang memadai	Koordinasi dengan Bidang Terkait	Usulan draft Rancangan Peraturan Daerah

KIR*)	Pernyataan Resiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Resiko
			Sumber	U/C	Uraian		
			internal	U	Beban kerja ASN (personel kurang)	-	ke Biro Hukum terhambat
			Eksternal	U	Kehadiran Pimpinan	-	
5.1.5	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh biro hukum dengan Instansi terkait Tertunda	Kepala Badan	Eksternal	C	ASN biro hukum tidak Lengkap	Pengaturan Ulang jadwal Rapat	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh biro hukum dengan Instansi terkait Tertunda
			Eksternal	C	Data kurang Lengkap	Koordinasi dengan Instansi Terkait	
5.1.6	Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian kurang efektif	Kepala Badan	internal	U	Tidak tersedianya anggaran	-	Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian kurang efektif
		Kepala Badan	internal	C	Pendampingan dari Biro Hukum terhambat	Koordinasi dengan Instansi Terkait	
		Kepala Badan	Eksternal	U	Pejabat kementerian yang berkompeten tidak di tempat	-	
5.1.7	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD terhambat	Kepala Badan	internal	C	Tidak tersedianya anggaran	Koordinasi dengan Bidang Renbang	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD terhambat
			Eksternal	U	Komisi DPRD yang membidangi tidak Lengkap	-	
			Eksternal	C	Penetapan waktu rapat sulit	Jadwal ulang tanggal pelaksanaan rapat	
5.1.8	Pengesahan / Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah terlambat	Kepala Badan	Eksternal	U	Kehadiran Pejabat/Gubernur	-	Pengesahan / Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah terlambat

Nama Kegiatan	Pelayanan Kesamsatan di UPTB UPPD
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya pelayanan kesamsatan yang prima dan memuaskan Wajib Pajak

DAFTAR RISIKO UPT UPPD

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1	Pembayaran PKB (Pengesahan STNK Setiap Tahun dan Perpanjangan STNK 5 Tahunan) Dan BBN I dan BBN II (FAD I & II, LELANG, HIBAH, JUAL BELI DAN UBAH BENTUK/ FUNGSI/GANTI MESIN)						
6.1.1	Pelayanan tidak sesuai dengan SOP	Kepala UPTB UPPD	Eksternal	C	Persyaratan pendaftaran tidak dilengkapi oleh Wajib Pajak	Formulir harus selalu tersedia secara lengkap, penjelasan oleh CSO secara detail kepada WP	Lambatnya pelayanan di Samsat
					Gangguan Jaringan / kerusakan komputer/ listrik padam	Melaporkan kepada TIM IT Kantor Induk dan membuat BA setiap terjadi Gangguan Teknis di pelayanan	Pelayanan terganggu secara teknis
			Internal	C	Kurang cakap dan cekatan petugas pelayanan	Bintek Kesamsatan, Kehumasan, Komputer dan IT bagi Petugas Pelayanan	Personil yang ditunjuk kurang kompeten
6.1.2	Kesalahan penetapan(Data Ranmor, nilai PKB, BBNKB, Denda dan Masa laku)	Kepala UPTB UPPD	Eksternal	C	Jenis Ranmor yang belum tercantum di NJKB	Mengajukan SK Kepala Badan tentang NJKB yang Baru	Menimbulkan denda, kurang bayar, lebih bayar, salah cetak notice (batal dan rusak)

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
			Internal	C	Kurang cermatnya petugas penetapan akan menyebabkan kesalahan nilai pajak	Masing Petugas Korektor, verifikator, Penetapan, Pencetak, Kasir dan koordinator samsat harus paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing	Ketidakcermatan petugas dalam bekerja
6.2	Rumitnya Pembuatan Fiskal Antar Daerah						
6.2.1	Data Potensi Kendaraan Bermotor tidak terdata secara akurat	Kepala UPTB UPPD	Eksternal	C	Registrasi Data Kendaraan Bermotor di Kepolisian tidak sesuai dengan data arsip pada album Bappenda	Pemutakhiran data baik secara fisik di arsip manual maupun di data server	Sikronisasi data dan integrasi data kepolisian dan Bappenda belum tuntas
6.2.2	Pengesahan Fiskal terkendala	Kepala UPTB UPPD	Internal	C	Pejabat yang berwenang mengesahkan tidak ada di tempat	Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang ada dibawahnya	Keterlambatan penerbitan Fiskal
6.3	Pengarsipan notice/SKPD yang tidak teratur dan tertib						
6.3.1	Kesulitan dalam mencari notice/SKPD	Kepala UPTB UPPD	Internal	C	Kurang tertib dan telatennya petugas di bagian arsip	Sebaiknya dilakukan oleh petugas arsiparis	Masih adanya notice yang tidak masuk dalam album
6.4	Pelaksanaan OPGAP yang tidak sesuai target						
6.4.1	Jumlah kendaraan yang terjaring operasi gabungan tidak semuanya yang melakukan pembayaran	Kepala UPTB UPPD	Eksternal	UC	Banyak kendaraan plat luar daerah yang ikut terjaring	Memberikan sanksi yang jelas	Tindal lanjut pelaksanaan OPGAP
					Terjadi pelanggaran lalin yang mencelakai petugas	Asuransi bagi petugas OPGAP	Peraturan terkait belum ada

KIR*)	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
					dilapangan	dilapangan	
					Kendaraan yang terjaring bukan atas nama pengendara	Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat	Kurangnya kesadaran pengendara
6.5	Pelaksanaan Surat Teguran yang tidak tepat sasaran/WP						
6.5.1	Banyaknya Wajib Pajak yang telah berpindah alamat, berubah status kepemilikan, kendaraan sudah hilang dll	Kepala UPTB UPPD	Eksternal	C	Kurangnya kesadaran WP	Himbauan untuk melakukan Mutasi/Balik Nama	Terjadi tunggakan pajak
			Internal	C	Keterbatasan tenaga dan waktu oleh petugas dalam menyampaikan surat teguran kemasing-masing alamat WP	Diperlukan teknologi yang mendukung dan mempermudah agar surat teguran dapat diterima oleh WP	Kurang nya personil dan teknologi

PENYUSUNAN STATUS RISIKO

Tujuan Penyusunan	Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.
Nama Kegiatan	Administrasi dan Umum
Tujuan Kegiatan	Tertib Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan
STATUS RISIKO SEKRETARIAT	

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)	(8)
1.1	Administrasi Keuangan						
1.1.1	Pengajuan SPP-GU/LS belanja Barang dan Jasa terlambat	Sering Terjadi	4	Besar	4	16	Tinggi
1.1.2	Realisasi/ serapan anggaran tidak mencapai target	Kemungkinan Terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
1.1.3	Kehilangan/ketektoran kas	Kecil Kemungkinan	2	Kecil	2	4	Sedang
1.1.4	Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran (SPJ)	Kecil Kemungkinan	2	Menengah	3	6	Sedang
1.1.5	Laporan Keuangan terlambat	Kemungkinan Terjadi	3	Menengah	3	9	Sedang
1.1.6	Laporan Keuangan tahunan tidak sesuai SAP	Kemungkinan Terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
1.2	Administrasi Kepegawaian						
1.2.1	Keterlambatan kenaikan pangkat	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
1.2.2	Panggilan diklat tidak dapat dipenuhi	Kecil Kemungkinan	2	Sangat Tinggi	5	10	Tinggi
1.2.3	Penerbitan SK KGB terlambat	Sangat tidak mungkin	1	Sangat rendah/tidak signifikan	1	1	Rendah

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1.2.4	Pengusulan kenaikan pangkat pegawai terlambat	Sangat tidak mungkin/mustahil	1	Sangat rendah/tidak signifikan	1	1	Rendah
1.2.5	Penyusunan laporan Rekapitulasi Absensi tidak tepat waktu	Kemungkinan terjadi	2	Sangat Tinggi	5	10	Tinggi
1.2.6	Data Rekapitulasi Absensi tidak akurat	Sangat tidak mungkin/mustahil	1	Sangat rendah/tidak signifikan	1	1	Rendah
1.3	Pengelolaan Barang						
1.3.1	Kehilangan barang inventaris	Kemungkinan Terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
1.3.2	Kerusakan barang	Kemungkinan Terjadi	3	Menengah	3	9	Sedang
1.3.3	Pengadaan Barang tidak sesuai dengan kebutuhan	Kecil Kemungkinan	2	Menengah	3	6	Sedang

Nama Kegiatan Menghimpun dan Menyusun Laporan Pajak Daerah

Tujuan Kegiatan Menyediakan informasi yang valid terkait realisasi Pajak Daerah

STATUS RISIKO BIDANG PAJAK DAERAH

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)	(8)
2.1.1	Keterlambatan Laporan PKB dan BBNKB dari UPTB UPPD	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
2.1.2	Keterlambatan Laporan Pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dari Wajib Pajak Air Permukaan	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
2.1.3	Data dari UPTB UPPD kurang valid	Kecil Kemungkinan	2	Besar	4	8	Sedang

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
2.1.4	Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersifat sepihak	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
2.1.5	Keterlambatan Penyajian Laporan Pajak Daerah	Kecil Kemungkinan	2	Besar	4	8	Sedang

Nama Kegiatan	Menyiapkan Sistem Manajemen Mutu
Tujuan Kegiatan	Seluruh UPTB UPPD Se-NTB menerapkan Sistem Manajemen Mutu

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)	(8)
2.2.1	Keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pembayaran PKB, PBBKB dan PAP	Kecil Kemungkinan	2	Kecil	2	4	Sedang
2.2.2	Tingginya angka Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)	Kecil Kemungkinan	2	Menengah	3	6	Sedang

Nama Kegiatan	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)	(8)
2.3.1	Tidak tercapainya target pajak daerah	Kemungkinan terjadi	2	Besar	4	8	Sedang
2.3.2	Tingginya angka tidak melakukan daftar ulang (TMDU)	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
2.3.3	Data obyek pajak Air Permukaan kurang valid	Kemungkinan terjadi	3	Menengah	3	9	Sedang

Nama Kegiatan	Konsultasi dan koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan
Tujuan Kegiatan	Memastikan transfer dana pusat sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku

STATUS RISIKO BIDANG RETRIBUSI

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)x(6)	(8)
3.1.1	Penundaan penyaluran dan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kemungkinan terjadi	3	Sangat Tinggi	5	15	Tinggi
3.1.2	Keterlambatan transfer dana Bagi hasil dan Kurang bayar	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
3.1.3	Keterlambatan penyajian laporan dana perimbangan kepada pimpinan	Sering Terjadi	4	Menengah/ medium	3	12	Tinggi

Nama Kegiatan	Sinkroniasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL
Tujuan Kegiatan	Menyediakan informasi yang valid terkait data potensi sebagai bahan penetapan rencana target Retribusi dan PLL

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
3.2.1	Data potensi obyek penerimaan tidak akurat	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang
3.2.2	Realisasi target penerimaan obyek retribusi rendah	Sering Terjadi	4	Sangat Tinggi	5	20	Sangat Tinggi
3.2.3	Realisasi target penerimaan obyek pendapatan lainnya rendah	Kemungkinan terjadi	3	Sangat Tinggi	5	15	Tinggi
3.2.4	Target retribusi dan PLL yang ditetapkan terlalu besar atau terlalu sedikit	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang

Nama Kegiatan	Verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL
Tujuan Kegiatan	Menyediakan informasi yang valid terkait realisasi retribusi daerah dan pendapatan lainnya

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
	Penyajian laporan						
3.3.1	Keterlambatan Laporan dari SKPD Pengelola Retribusi dan PLL	Sering Terjadi	4	Menengah/ medium	3	12	Tinggi
3.3.2	Data dari SKPD tidak sinkron/valid	Sering Terjadi	4	Sangat Tinggi	5	20	Sangat Tinggi
	Monitoring						
3.3.3	Saat Monitoring ke SKPD, tidak bertemu langsung dengan pimpinan SKPD dan atau bendahara penerima	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang
3.3.4	Data yang diperlukan belum siap	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang
3.3.5	Gangguan Kesehatan (Mabuk/pusing) petugas verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL (saat melakukan monitoring)	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang

Nama Kegiatan	Intensifikasi obyek retribusi dan pendapatan lainnya
Tujuan Kegiatan	Peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola retribusi dan Pendapatan lainnya

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
	Bimtek Bendahara Penerimaan/Rakor Evaluasi Penerimaan						
3.4.1	SKPD yang diundang tidak mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Bimtek/Rakor	Kemungkinan terjadi	3	Besar	4	12	Tinggi
3.4.2	Perwakilan dari SKPD bukan bendahara penerimaan atau pembantu bendahara penerimaan Pejabat terkait yang menangani penerimaan daerah	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang
3.4.3	Keterlambatan peserta/narasumber Bimtek/ Rakor	Kemungkinan terjadi	3	Menengah/ medium	3	9	Sedang

Nama Kegiatan	Penyusunan Renja, RKA dan DPA
Tujuan Kegiatan	Tersusunnya Renja, RKA dan DPA yang berkualitas (memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan)

STATUS RISIKO BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
4.1	Penyusunan Renja, RKA dan DPA						
4.1.1	Penyusunan Renja, RKA dan DPA tidak tepat waktu	Kecil Kemungkinan	2	Kecil	2	4	Sedang
4.1.2	Kegiatan di DPA belum/tidak bisa direalisasikan	Kecil Kemungkinan	2	Kecil	2	4	Sedang
4.1.3	Kegiatan dalam DPA ada yang tidak sesuai kebutuhan	Kecil Kemungkinan	2	Kecil	2	4	Sedang
4.2	Penyusunan Laporan Berkala						
4.2.1	Laporan Berkala terlambat	Kemungkinan terjadi	3	Menengah	3	9	Sedang
4.2.2	Laporan Berkala tersaji dengan data sementara	Besar Kemungkinan	5	Menengah	3	15	Tinggi
4.3	Pengelolaan Teknologi dan Informasi						
4.3.1	Pelayanan pajak daerah (secara online) terganggu	Kemungkinan terjadi	3	Besar	5	15	Tinggi
4.3.2	Sarana dan prasarana teknologi kurang memadai/mendukung	Kecil Kemungkinan	2	Menengah	3	6	Sedang
4.4	Pelaksanaan Rakor Penetapan Target						
4.4.1	Pelaksanaan Rakor terlambat	Kemungkinan terjadi	3	0	3	9	Sedang
4.4.2	Peserta yang diundang tidak lengkap	Kecil Kemungkinan	2	Besar	5	10	Tinggi
4.4.3	Ada beberapa peserta tidak hadir	Kemungkinan terjadi	3	Besar	5	15	Tinggi

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
4.4.4	Pembahas berhalangan hadir	Kecil Kemungkinan	2	Menengah	3	6	Sedang
4.4.5	Pihak Hotel tidak maksimal dalam memberikan layanan	Kecil Kemungkinan	2	Menengah	3	6	Sedang
4.4.6	Adanya OPD yang belum sepakat mengenai penetapan besaran target pendapatan daerah	Kemungkinan terjadi	3	Menengah	3	9	Sedang

Nama Kegiatan	Perubahan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tujuan Kegiatan	Memberikan Kepastian Hukum atas Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

STATUS RISIKO BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

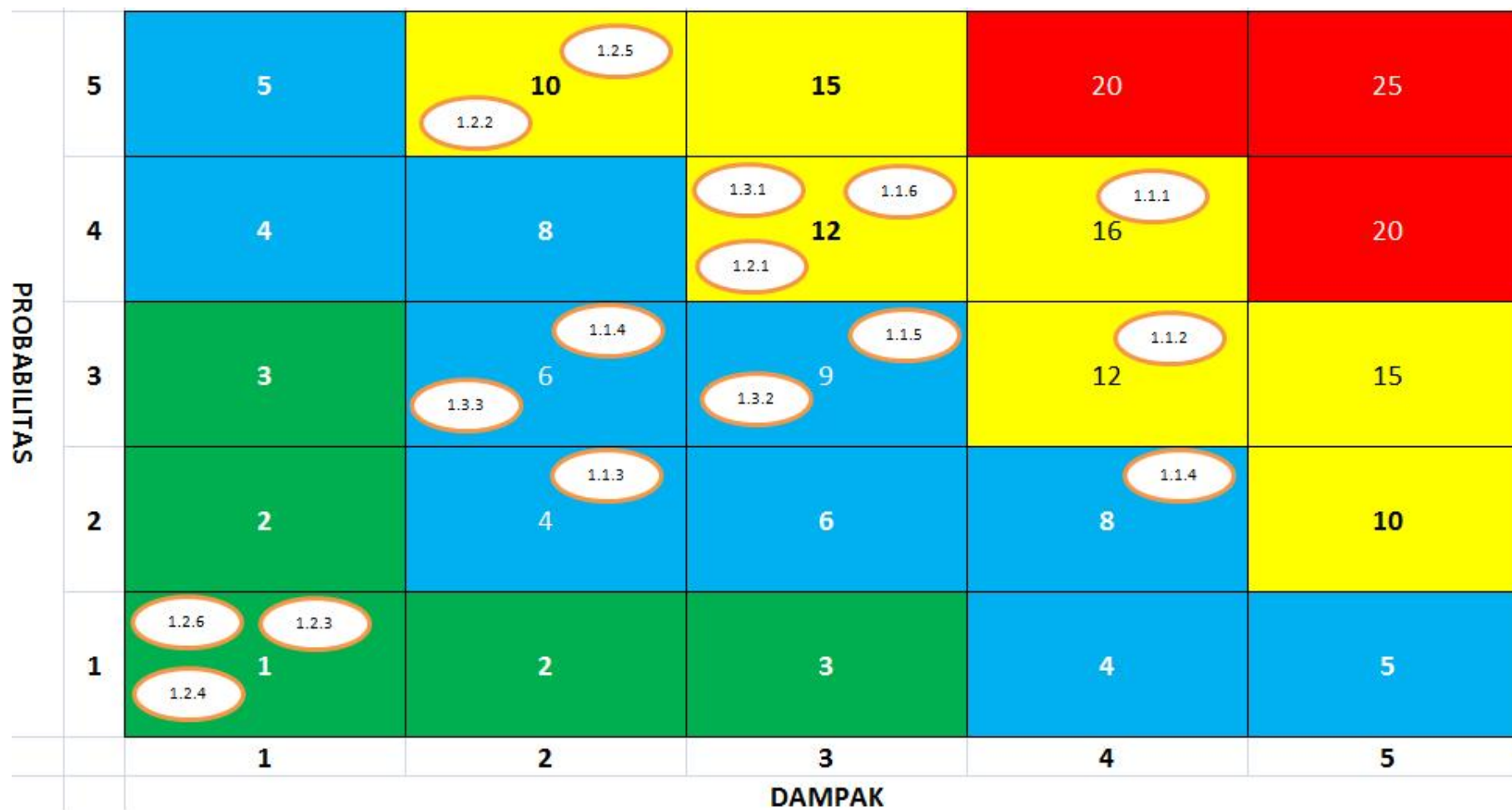
KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)	(8)
5.1.1	Pembahasan Peraturan Daerah Tertunda	Sering Terjadi	4	Kecil	2	8	
5.1.2	Pemetaan Potensi Retribusi Daerah kurang akurat	Kemungkinan terjadi	3	Kecil	2	6	Sedang
5.1.3	Penyusunan draft Peraturan Daerah terhambat	Sering Terjadi	4	Kecil	2	8	Sedang
5.1.4	Usulan draft Rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum terhambat	Sering Terjadi	4	Kecil	2	8	Sedang
5.1.5	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh biro hukum dengan Instansi terkait Tertunda	Sering Terjadi	4	Kecil	2	8	Sedang
5.1.6	Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian kurang efektif	Kemungkinan terjadi	3	Menengah / medium	3	9	Sedang
5.1.7	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD terhambat	Kemungkinan terjadi	3	Menengah / medium	3	9	Sedang
5.1.8	Pengesahan / Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah terlambat	Kemungkinan terjadi	3	Menengah / medium	3	9	Sedang

Nama Kegiatan	Pelayanan Kesamsatan di UPTB UPPD
Tujuan Kegiatan	Terlaksananya pelayanan kesamsatan yang prima dan memuaskan Wajib Pajak

STATUS RISIKO UPTB UPPD

KIR	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(6)	(8)
6.1	Pembayaran PKB (Pengesahan STNK Setiap Tahun dan Perpanjangan STNK 5 Tahunan) Dan BBN I dan BBN II (FAD I & II, LELANG, HIBAH, JUAL BELI DAN UBAH BENTUK/ FUNGSI/GANTI MESIN)						
6.1.1	Pelayanan tidak sesuai dengan SOP	Sangat Sering terjadi	5	Sangat Besar	5	25	Sangat Tinggi
6.1.2	Kesalahan penetapan (Data Ranmor, nilai PKB, BBNKB, Denda dan Masa laku)	Jarang terjadi	2	Sangat Besar	5	10	Tinggi
6.2	Rumitnya Pembuatan Fiskal Antar Daerah						
6.2.1	Data Potensi Kendaraan Bermotor tidak terdata secara akurat	Sangat Jarang terjadi	1	Kecil	2	2	Rendah
6.2.2	Pengesahan Fiskal terkendala	Sangat Jarang terjadi	1	Kecil	2	2	Rendah
6.3	Pengarsipan notice/SKPD yang tidak teratur dan tertib						
6.3.1	Kesulitan dalam mencari notice/SKPD	Sering terjadi	5	Sedang	3	15	Tinggi
6.4	Pelaksanaan OPGAP yang tidak sesuai target						
6.4.1	Jumlah kendaraan yang terjaring operasi gabungan tidak semuanya yang melakukan pembayaran	Jarang terjadi	2	Kecil	2	4	Sedang
6.5	Pelaksanaan Surat Teguran yang tidak tepat sasaran/WP						
6.5.1	Banyaknya Wajib Pajak yang telah berpindah alamat, berubah status kepemilikan, kendaraan sudah hilang dll	Sangat sering terjadi	5	Besar	4	20	Sangat Tinggi

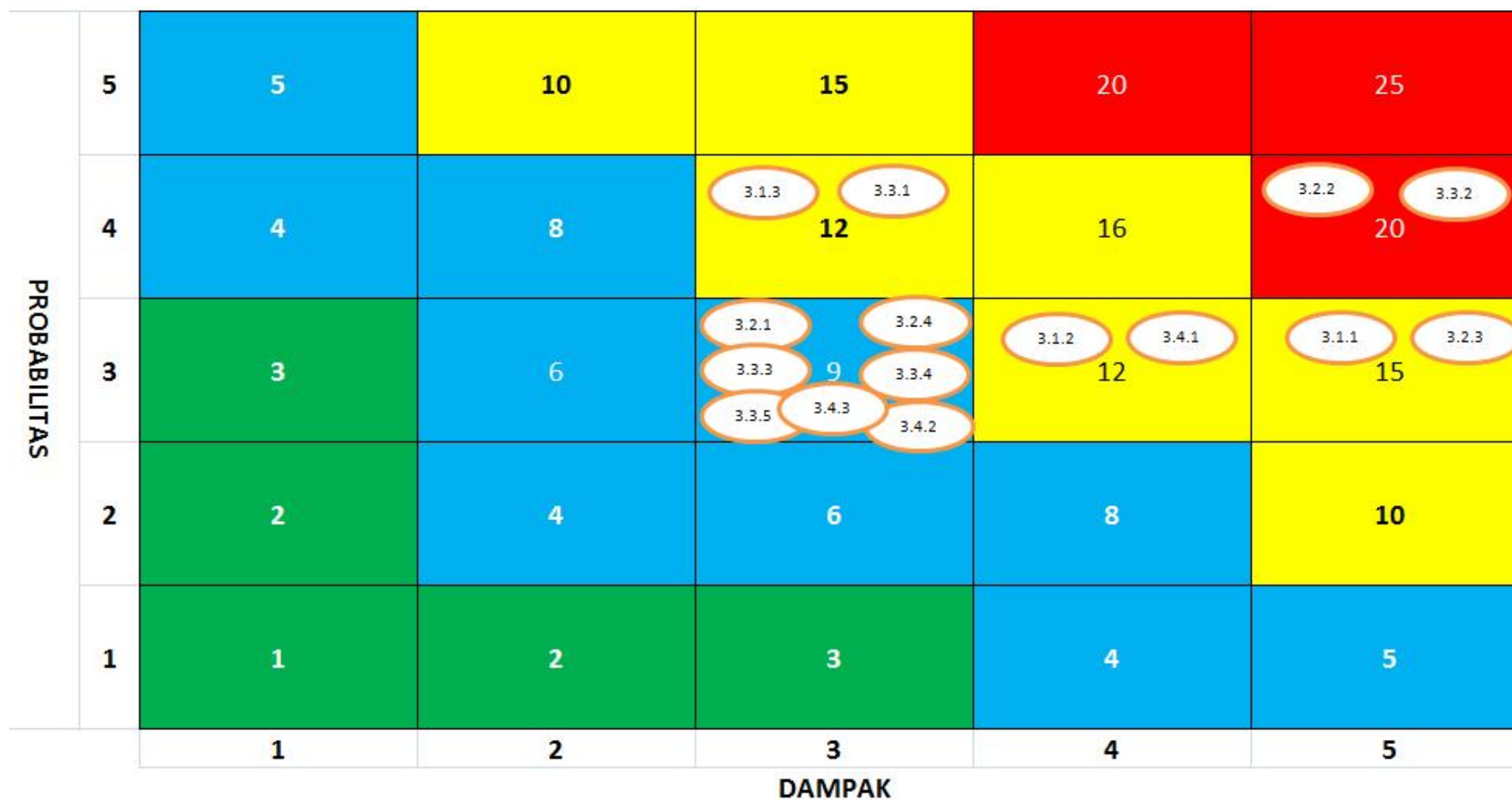
PETA RISIKO
SEKRETARIAT BAPPENDA PROVINSI NTB



PETA RISIKO
BIDANG PAJAK DAERAH, BAPPENDA PROVINSI NTB

PROBABILITAS	5	5	10	15	20	25
	4	4	2.1.3 2.1.5 2.3.1 8	2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.3.2 12	16	20
	3	3	2.2.2 6	2.3.3 9	12	15
	2	2	2.2.1 4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

PETA RISIKO
BIDANG RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA, BAPPENDA PROVINSI NTB



PETA RISIKO
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN, BAPPENDA PROVINSI NTB

PROBABILITAS	5	5	10	15 4.2.2	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9 4.2.1 4.4.1 4.4.6	12	15 4.3.1 4.4.3
	2	2 4.1.1 4.1.2 4.1.3	4 4.3.2 4.4.4 4.4.5	6	8	10 4.4.2
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

PETA RISIKO
BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN, BAPPENDA PROVINSI NTB

PROBABILITAS	5	5	10	15	20	25
	4	4	5.1.1 5.1.3 8 5.1.5 5.1.4	12	16	20
	3	3	6 5.1.2	5.1.7 9 5.1.6 5.1.8	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				

**PETA RISIKO
UPTB UPPD BAPPENDA PROVINSI NTB**

PROBABILITAS	5	5	10	1.6.3.1 15	1.6.5.1 20	1.6.1.1 25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	1.6.4.1 4	6	8	1.6.1.2 10
	1	1	1.6.2.1 2 1.6.2.2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		DAMPAK				